

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai luas wilayah No. 2 di Jawa Timur, oleh karena itu jumlah aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Malang sangat banyak dan luas untuk setingkat pemerintah daerah. Total seluruh aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini ada 3212 bidang aset tanah dan bangunan. Tahun 2021 terdapat temuan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsurgah) yang selanjutnya kita sebut sebagai MCP Kopsurgah KPK yaitu sebanyak 2274 bidang tanah dan bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang belum bersertifikat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk mensertipikatkan seluruh aset Pemerintah Kabupaten Malang. (Dinas Pertanahan Kabupaten Malang: 2022)

Aset merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang dalam bekerja oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Efisiensi dalam pengelolaan aset milik daerah adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sehingga pengadaan aset milik daerah yang diperlukan harus benar-benar sesuai

dan terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud menghindari pemborosan keuangan daerah. Pentingnya pengelolaan aset itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah instansi. Disebuah instansi mempunyai begitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan harus terjaga.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini diprioritaskan untuk mengetahui:

1. Analisis aspek yang paling dominan yang digunakan untuk pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Dampak dari pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan;

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. kriteria apa saja yang digunakan untuk pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang?
2. Dampak apa yang terjadi pada pengamanan aset tanah dan bangunan berdasarkan hasil penentuan kriteria?

## **1.4. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya terbatas pada:

1. Menentukan aspek apa saja yang dominan yang digunakan untuk pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Permenpan No.19 tahun 2016;
2. Lokasi penelitian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang;

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menentukan kriteria apa saja yang dominan yang digunakan untuk pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Permenpan No.19 tahun 2016;
2. Untuk menganalisis dampak apa yang terjadi berdasarkan hasil penentuan kriteria;

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dapat memberikan analisis secara ilmiah tentang pengelolaan aset tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

1. Manfaat praktis

Dapat memberikan input pada Pemerintah Kabupaten Malang tentang pengelolaan manajemen aset.

2. Manfaat akademis

Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.